

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.

A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia berdasarkan PP No. 24/1997 dilengkapi dengan PP No. 37/1998*, Mandar Maju, Bandung, 1999.

Abdurahman, *Beberapa Aspek Hukum Agraria*, Alumni, Bandung, 1983.

Adrian Sutedi, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak*, Jakarta, Cipta Jaya, 2006.

Bachtiar Effendi, *Pendaftaran di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung 1983.

Boedi Harsono, *Himpunan Peraturan Hukum Tanah*, Penerbit: Djambatan, 2000.

_____, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Pertanahan*, Djambatan, Jakarta, 2002.

_____, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2002.

_____, *Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit: Djambatan, 2000.

_____, *Beberapa Analisis tentang Hukum Agraria II*, Penerbit: Esa Studi Club, Jakarta, 1978.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Departemen Pertanian, *Pedoman Teknis Sertifikasi Tanah Petani*, Direktorat Pengelolaan Lahan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Jakarta, 2009.

Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia (Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 1986.

Imam Sudiyat, *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, 1982.

K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak-Hak Atas Tanah, Prenada Media Kencana*. Jakarta, 2003.

B. Perundang-Undangan:

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pertanahan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

C. Internet:

Administrator, "Program Nasional dan Daerah Bidang Agraria Untuk Masyarakat Hinterland", <http://humasbatam.com/2009/05/29/program-nasional-dan-daerah-bidang-agraria-untuk-masyarakat-hinterland>.

Bambang.S Widjanarko, "Perlunya Revitalisasi Fungsi Sertifikat Tanah", <http://pertanahan99.blogspot.com/2010/09/perlu-revitalisasi-fungsi-sertifikat.html>.

Iswan B Padu, "Sejarah Kelembagaan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia", <http://sarmanpsagala.wordpress.com/2010/08/05/sejarah-kelembagaan-badan-pertanahan-nasional-republik-indonesia/>.